

# **BAB I**

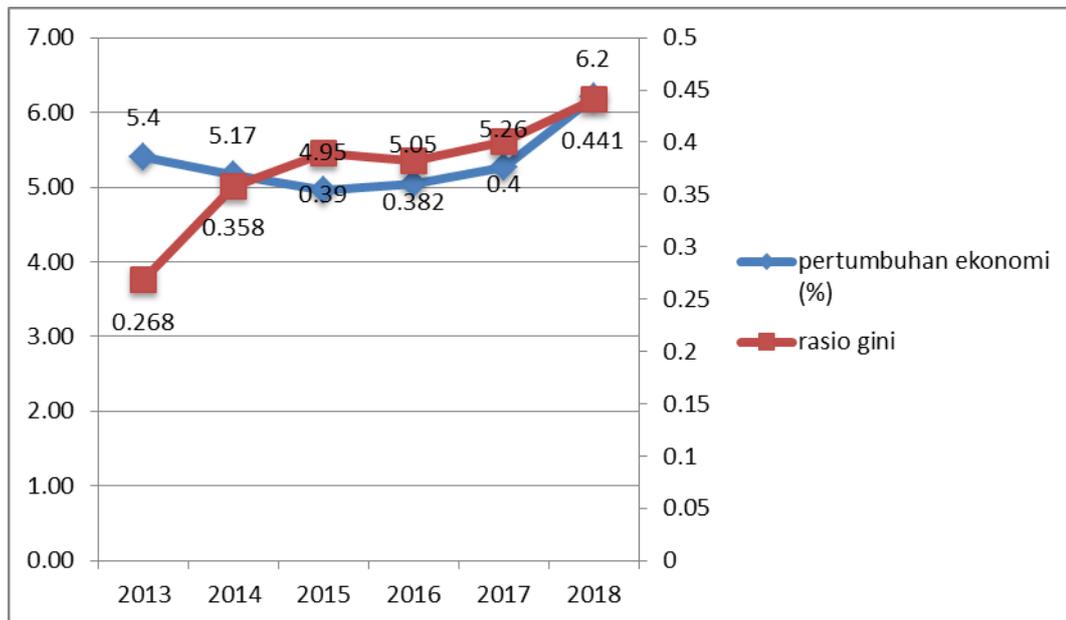
## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi suatu Negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan yang berkembang apabila pertumbuhan perekonomian mengalami peningkatan dari masa sebelumnya. Dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sejatinya merupakan pertumbuhan yang mampu menciptakan pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah menetapkan target yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan infrastruktur daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2018. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonominya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Gambar 1.1 menunjukkan Pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 hingga 2018 mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun – tahun sebelumnya mengalami penurunan akan tetapi pertumbuhan ekonomi di Daerah

Istimewa Yogyakarta terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 berada di posisi 6,20 Persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

### GAMBAR 1.1

Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2013-2018

Walaupun pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, namun ini bisa saja menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Dalam melihat kesejangan pendapatan disuatu wilayah, maka kita melihat dari indeks gini rasionya. Rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Jika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, namun sebaliknya jika bernilai 1 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Pada gambar 1.1 menunjukkan Rasio gini di Daerah Istimewa Yogyakarta selama

periode 2013-2018 berfluktuasi cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2013 rasio gini berada di posisi 0,268 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 di posisi 0,441, angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari kondisi ini menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ekonomi masih rendah perlu ada perhatian lebih terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi

Menurut Sanjaya (2014) salah satu yang menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah adalah tingkat literasi keuangan. Menurut OJK, secara nasional Tingkat Literasi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dikategorikan rendah dibandingkan dengan tingkat penggunaan produknya secara nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi 27 Persen. Maksudnya adalah hanya 27 Persen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang paham mengenai produk keuangan. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi keuangan adalah kondisi geografis dan mayoritas masyarakatnya berada didaerah pedesaan sehingga menghambat akses terhadap layanan jasa keuangan terutama di sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menguasai industri keuangan di Indonesia yang dimana memiliki aset terbesar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya sehingga membuat perbankan mampu menarik konsumen lebih banyak dibandingkan keuangannya lainnya karena masyarakat lebih memilih menyimpan asetnya di perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga. Pembangunan sektor keuangan terutama sektor perbankan dapat meningkatkan akses dan penggunaan

jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses jasa keuangan maka masyarakat diharapkan mampu memanfaatkannya serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan akan menyebabkan masyarakat mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usahanya. Akibatnya akan menambah ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi akan jalan melambat (Allen ,2012). Sektor perbankan juga menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan berkembangnya sektor perbankan, distribusi layanan jasa perbankan juga harus merata. Meskipun jumlah kantor cabang bank, DPK yang terhimpun, serta kredit yang disalurkan makin meningkat, namun masih banyak masyarakat indonesia yang belum mampu mengakses jasa perbankan. Jasa keuangan formal sulit diakses oleh masyarakat desa sehingga mereka memilih untuk meminjam dan menabung di lembaga keuangan informal (Anggraeni, 2009). Untuk mengatasi keterbatasan akses layanan perbankan ini , maka muncul suatu program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan keuangan inklusi. Menurut Sarma (2011), inklusi keuangan adalah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi. Keuangan inklusif merupakan upaya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal dengan cara menghilangkan hambatan, baik hambatan yang bersifat harga maupun hambatan

yang bersifat non harga (*World Bank*, 2018). Keuangan inklusi mempromosikan akses dan penggunaan layanan keuangan berkualitas tinggi secara global, khususnya masyarakat miskin (Steelyana, 2013)

Inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional terutama Indonesia. Pada bulan Juli 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu tujuan dari strategi ini adalah menjadikan strategi nasional keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang semakin inklusi dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih besar bagi setiap penduduknya terutama kelompok miskin dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan.

Strategi keuangan inklusif muncul karena rendahnya akses keuangan oleh masyarakat yang disebabkan dari tingkat pendapatan yang rendah, pengetahuan masyarakat akan keuangan dan perbankan masih kurang. Biaya administrasi yang dianggap masih tinggi serta jauhnya jangkauan bank dari pemukiman masyarakat. Pentingnya sebuah sistem keuangan yang inklusif secara luas diakui dalam lingkaran kebijakan dan inklusi keuangan dipandang sebagai prioritas kebijakan di banyak negara.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Sarma (2012) mengembangkan alat ukur untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah dengan merumuskan indeks inklusi keuangan. Dimana perumusan indeks ini dibagi menjadi 3 dimensi atau indikator yaitu :

a. Dimensi Penetrasi Perbankan.

Dimensi penetrasi perbankan adalah indikator dalam keuangan inklusif. Semakin banyak penggunaannya maka akan semakin baik keuangan inklusif, oleh karena itu sistem keuangan diharapkan mampu menjangkau secara menyeluruh di penggunaannya. Salah satu yang menjadi indikator dalam penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening di bank.

b. Dimensi Ketersediaan Jasa Perbankan.

Dimensi ketersediaan jasa keuangan ini menjelaskan tentang sejauh mana industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Apabila industri perbankan mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas, maka masyarakat akan mudah untuk mengenal dan memanfaatkan produk perbankan, sehingga jelas hal ini dapat berdampak pada perilaku keuangan personal masyarakat tersebut. Ketersediaan layanan dapat ditunjukkan dengan jumlah outlet bank (per 1000 penduduk) dan / atau dengan nomor ATM per 1000 orang, atau jumlah karyawan bank per pelanggan.

c. Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan.

Untuk indikator penggunaan jasa perbankan ini menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat mampu menggunakan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini dapat menjelaskan perilaku masyarakat dalam mengelola finansial di dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk perbankan tersebut serta diperlukan karena tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan “*unbanked people*” maka pemahaman terhadap produk-produk perbankan juga masih rendah.

Indeks pengukuran inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi indeks inklusi keuangan suatu wilayah berhubungan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Indeks inklusi keuangan dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui perkembangan kegiatan keuangan disuatu wilayah dan menunjukkan sejauh mana strategi nasional keuangan inklusif yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan keuangan inklusif dapat tercapai jika masyarakat di semua wilayah di Indonesia memiliki akses keuangan yang sama dan merata.

Dalam islam, pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan dipandang penting karena dengan terdapatnya keadilan dalam distribusi maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fauzia dan Riyadi (2014) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dasar islam yaitu menyejahterakan pemeluknya baik didunia maupun di akhirat. Ini bisa terjadi jika kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan terealisasi dengan baik dan merata. Sehingga tidak ada kesejangan atau ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si

miskin. Allah mengancam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi pada orang tertentu saja. Ini tertuang dalam dalam Al-Hasyr ayat 7 yang menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dilarang oleh Allah SWT.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui distribusi pendapatan merata, harus dapat dirasakan oleh semua kalangan tidak hanya untuk orang –orang kaya saja , namun juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat seluruh kalangan baik yang miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini akan menyebabkan terjadinya kecemburua sosial yang memincu adanya kesenjangan dikalangan masyarakat sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Pada hasil penelitian Sanjaya (2015) menunjukkan inklusi keuangan di Indonesia dikategorikan rendah. Ini berkaitan dengan penelitian Ummah (2015) yang mana rata-rata indeks keuangan inklusi antar provinsi di Indonesia berkisar antara 0,1-0,33 kecuali provinsi DKI Jakarta yang tergolong tinggi mencapai 0,8. Menurut penelitian Atikah (2016), Hampir seluruh daerah kabupataen/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat keuangan inklusi rendah. Untuk

daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar 0,05-0,1 kecuali untuk kota Yogyakarta yang tergolong tinggi karena mencapai 0,693 karena disebabkan kota Yogyakarta merupakan ibukota provinsi dan pusat kegiatan perekonomian dan pembelajaran. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya terhadap jasa keuangan. Hal ini dapat terlihat dari tiga sisi yaitu aksesabilitas, ketersediaan, dan penggunaan. Dilihat dari kondisi ini, menunjukkan bahwasanya masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian Sarma dan Pais (2011) mengatakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keuangan inklusif di negara dapat disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur. Beberapa faktor pada keadaan sosial-ekonomi antara lain pendapatan per kapita, angka melek huruf, populasi desa dan pengangguran. Sementara itu yang termasuk dalam kategori infrastruktur adalah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna internet, dan jumlah pengguna telepon.

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. PDRB Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis apa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya.. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduk untuk memperoleh informasi melalui kemampuan

menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. jalan aspal merupakan salah satu infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan yang baik dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada pada suatu wilayah akan memudahkan akses pada lembaga keuangan. peningkatan lapangan kerja baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal sehingga meningkatkan keuangan inklusi. Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan, akan sedikit kemungkinan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan (Lenka dan Barik, 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis faktor – faktor inklusi keuangan tingkat Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013 - 2018. Kabupaten/kota yang akan diteliti oleh penulis adalah Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Faktor terkait yang akan diteliti dalam mempengaruhi keuangan inklusif adalah faktor sosial ekonomi yang diwakilkan oleh PDRB Per kapita, angka melek huruf, pengangguran, dan faktor infrastruktur yang diwakilkan oleh jalan aspal.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018 ?
4. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018 ?
5. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018 ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Inklusi Keuangan di di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018
3. Untuk mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Inklusi Keuangan di di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018
4. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Inklusi Keuangan di di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018

5. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya mengenai gambaran umum keuangan inklusif dan memberikan gambaran terkait pengaruh keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif sehingga dapat di jadikan sebagai bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan strategis terkait dengan peningkatan akses dan penggunaan jasa keuangan.
3. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusifitas keuangan disuatu wilayah.